BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). SDA yang melimpah seharusnya mampu menjadikan Bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang dapat memakmurkan rakyatnya. Kekayaan SDA pada kenyataannya tidak diikuti dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kemampuan SDM yang masih rendah mengakibatkan pembangunan Bangsa Indonesia mengalami hambatan.

Keadaan Bangsa Indonesia sekarang ini mengalami keterpurukan di berbagai bidang sehingga terjadi krisis yang berkepanjangan. Krisis yang berkepanjangan ini menuntut pemerintah dan rakyatnya untuk dapat bersama-sama mengatasinya. Pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan penyelenggaraan negara. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur kehidupan rakyat sehingga tercipta kemakmuran dan kesejahteraan.

Keberadaan daerah pada era otonomi daerah terbagi atas wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota dan Desa. Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam tercapainya pembangunan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam

melaksanakan tugas sangat dibutuhkan sehingga mampu berkompetisi dengan sektor swasta melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang efektif.

Pelaksanaan otonomi daerah menjadikan daerah sebagai pusat kegiatan pembangunan diberbagai sektor membutuhkan pertukaran arus informasi yang cepat. Untuk mendukung pertukaran arus informasi yang cepat ini, keterpaduan kegiatan pembangunan yang lebih partisipatif dan penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengakses keterhubungan informasi antar jenjang pemerintahan baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu antar pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.

Seiring dengan kemajuan teknologi di era globalisasi sekarang ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyikapi perkembangan tersebut dengan menerapakan apa yang disebut dengan *e-Government*. Penerapan *e-Government* merupakan bentuk usaha yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini melalui teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan *e-Government* bertujuan mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat.

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk dapat mengembangkan hidupnya baik dari segi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dalam rangka pengembangan pribadi dan

lingkungannya. Kebutuhan informasi sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu tidak salah jika pelayanan memperoleh informasi publik merupakan bagian dari hak dasar dalam kehidupan manusia. Kebutuhan informasi sama halnya dengan efektivitas pembangunan daerah. Hal ini dapat ditentukan dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah selaku pejabat publik dengan masyarakat. Komunikasi yang baik dapat menciptakan adanya transparansi informasi bagi publik.

Keinginan untuk menciptakan adanya transparansi informasi pada kenyataannya masih banyak masyarakat maupun individu-individu sosial yang tidak bisa mendapatkan haknya dalam memperoleh informasi. Masih ada lembaga atau badan-badan publik yang seharusnya tanpa diminta berkewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat, ternyata justru meyembunyikan informasi. Permasalahan yang sering ditemukan berkaitan dengan hak masyarakat dalam memperoleh informasi, yaitu banyaknya birokrasi yang harus dilewati oleh seseorang untuk memperoleh informasi di lembaga pemerintah. Kejadian seperti itu sebenarnya sudah menyimpang dari ketentuan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan publik seharusnya menjadi tanggung jawab setiap lembaga pemerintah untuk merealisasikannya.

Pelayanan untuk memperoleh informasi pada saat sekarang ini begitu kompleks. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini dimana perubahan demi perubahan berlangsung secara cepat dan

menjangkau lapisan yang luas. Perubahan yang cepat harus dikendalikan. Untuk menjamin agar proses perubahan yang terjadi dapat dikendalikan secara teratur maka dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat diterapkan sesuai dengan keadaan. Penerapan *e-Government* merupakan suatu mekanisme yang dapat menjawab segala permasalahan berkenaan dengan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mengimplementasikan penerapan *e-Government* membuat suatu sistem informasi yang disebut ***e-Lelang. e-Lelang*** **(*e-tendering*)**, adalah sebuah sistem yang akan mengadakan proses pelelangan umum secara elektronik untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. e-Lelang biasanya digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan evaluasi teknis untuk mendapatkan kualitas terbaik dan evaluasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar. Proses pengadaan barang atau jasa yang melalui e-Lelang adalah pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dengan variasi kualitas yang beragam, dan jasa pemborongan nonkonstruksi. e-Lelang terdiri dari e-Lelang Umum (Regular e-Tendering) dan e-Penerimaan Berulang (Reverse e-Tendering).

Penerapan e-Lelang di Pemerintah Kota Bandung di jalankan oleh UPT Bandung Elektronic Procurement atau Lembaga Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) Bappeda Kota Bandung. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia/Pokja ULP Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Berdasarkan pengalaman sejak tahun 2004 dalam hal pemberlakuan Keppres No. 80 Tahun 2003, efisiensi akan akan tercapai apabila proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta mengedepankan proses persaingan yang sehat.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- procurement) yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan

sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dewasa ini sangat memudahkan masyarakat untuk dapat menerima berbagai informasi. Perkembangan teknologi ini seharusnya dijadikan suatu *moment* bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan transparansi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan informasi mengenai segala kegiatan pemerintahan di daerahnya

Pada kenyataannya penerapan dan pemanfaatan e-Lelang ini mengalami berbagai kendala. Permasalahan yang sering muncul dalam penerapan sistem informasi dengan menggunakan teknologi tidak diiringi dengan kesiapan aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna, infrastruktur yang tidak memadai. Aparatur pemerintah dan masyarakat tidak semua mengetahui akan kegunaan dan manfaat suatu sistem informasi sebagai sarana dalam memperoleh layanan informasi.

Efektivitas e-Lelang dalam pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan berjalan efektif sehingga dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh setiap masyarakat. Sudah merupakan tugas pemerintah dan masyarakat untuk mampu mewujudkannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul **"Efektivitas *e- lelang* di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandung Electronic Procurement Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tujuan *e-lelang* di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung?
2. Bagaimana strategi *e-lelang* di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung?
3. Bagaimana kebijakan *e-lelang* di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung?
4. Bagaimana perencanaan *e-lelang* di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung?
5. Bagaimana program *e-lelang* di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung?
6. Bagaimana sarana dan prasana *e-lelang* di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung?
7. Bagaimana sistem pengawasan *e-lelang* di Pemerintah di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan KKL

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas *e-Lelang* pada UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung. Sedangkan tujuan KKL ini adalah:

1. Untuk mengetahui tujuan *e-lelang* pada di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui strategi *e-lelang* pada di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kebijakan *e-lelang* pada UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui perencanaan *e-lelang* pada di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui sarana dan prasarana *e-lelang* pada di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui program *e-lelang* di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui sistem pengawasan *e-lelang* di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Laporan KKL

Sejalan dengan permasalahan di atas, diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, yaitu diharapkan dapat memahami dan menambah wawasan serta dapat memberikan manfaat tentang Efektivitas *e- lelang* di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung.
2. Bagi kegunaan ilmiah, yaitu mengembangkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek di lapangan mengenai Efektivitas *e-lelang* di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung.
3. Bagi kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan kepada UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung mengenai efektivitas *e-lelang* di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui sistem pengawasan *e-Lelang* oleh UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kajian tentang efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya.

Umumnya efektivitas selalu berhubungan dan dipadukan dengan efisiensi yang merupakan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Unit organisasi yang efisien belum tentu efektif, karena meskipun

unit tersebut menghasilkan sejumlah keluaran dengan menggunakan masukan yang minimal atau menghasilkan keluaran terbanyak belum tentu tujuan organisasi yang maksimal, sehingga unit tersebut menjadi kurang efektif atau dengan kata lain efektivitasnya kurang memadai. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterikatan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh pendapat para ahli di atas, maka efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat James L. Gibson yang dikutip oleh Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianaya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

(dalam Kurniawan, 2005:107).

Keterkaitan antara variabel yang mempengaruhi efektivitas *e-Lelang* pada UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung, hanya ada tujuh indikator yang sangat mempengaruhi terhadap efektivitas *e-lelang*

tersebut. Tujuh indikator tersebut, yaitu : Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, Perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, Tersedianaya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Peneliti mengambil tujuh indikator tersebut karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung agar pelayanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.

Strategi adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Hasibuan, 1996:104). Menurut Robert H. Hayes dan Steven C. Wheelwright yang dikutip oleh Alfonsus Sirait, bahwa strategi terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

1. Wawasan waktu *(time horizon)*;
   Strategi dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya.
2. Dampak *(impact)*;
   Dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti.
3. Pemusatan upaya *(concentration of effort)*;
   Sebuah stategi yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit.

4. Pola keputusan *(pattern decision)*;
   Keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten.
5. Peresapan *(pervasiveness)*;
   Suatu strategi mencakup spektrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya.

(dalam Sirait, 1991:40).

Perumusan kebijakan adalah pernyataan umum perilaku daripada organisasi yang memberikan bimbingan dalam berfikir dan menentukan keputusan. Menurut pendapat Soewarno Handayaningrat dalam bukunya *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* menyebutkan, bahwa perumusan kebijakan terdiri dari beberapa indikator, sebagai berikut: (1) Pedoman, (2) Pengambilan keputusan (Handayaningrat, 1994:128).

Perencanaan merupakan penentuan tujuan utama organisasi berserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. (Terry1975),

Menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya *Manajemen Pengertian Sasar dan Masalah* yang mendefinisikan program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret, yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu: (1) Sasaran, (2) Prosedur, (3) Anggaran (Hasibuan, 1996:103).

Keterkaitan antara pengawasan dan pengendalian dalam ukuran efektivitas yang dikemukakan James L. Gibson yang dikutip Agung Kurniawan, merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut diperjelas Ukasah Martadisastra dalam bukunya *Azaz-Azas Manajemen Konsep dan Aplikasinya,* menyebutkan keterkaitan antara pengawasan dan pengendalian, sebagai berikut:

> "Rencana yang baik dapat gagal apabila tidak adanya kegiatan pengendalian, yaitu mengawasi, mencocokkan dan mengusahakan supaya segenap aktivitas berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki" (Martadisastra, 2002:92).

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Menurut moenir mengemukakan bahwa sarana adalah sebagai berikut :

> "segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja" (Moenir ,1992 : 119)

Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut pendapat George R. Terry dalam Sarwoto Kertodipuro mendefinisikan pengawasan, yaitu pengawasan merupakan pengarahan kepada tujuan, sehingga bersifat harapan yang menunjukan apa yang harus dilakukan. Adapun indikatornya, sebagai berikut:

1. Penentuan ukuran atau pedoman baku (standar);
2. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah/senyatanya dikerjakan;
3. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
4. Perbaikan atau pembetulan.

(dalam Kertodipuro, 1985:100).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manejemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

Pengertian pelayanan menurut Moenir adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memberikan bantuan atau kemudahan untuk mencapai tujuan tertentu (Moenir, 2006:12).

Sedangkan Menurut Kurniawan, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Kurniawan, 2005:4).

Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan transparansi pelayanan publik diatur dalam KeputusanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. KEP/26/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejah teraan masyarakat. Di samping itu, pada kondisi aktual selama ini, penyelenggaraan *public service* (pelayanan publik) yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam ber bagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan.

Menurut pendapat Ratminto dan Winarsih dalam bukunya *Sistem Informasi Manajemen* mendefinisikan sistem informasi, sebagai berikut:

> ”Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah

dimengerti" (Ratminto, Winarsih, 2005 : 19).

Jadi secara konseptual, transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa transparansi merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan msyarakat kepada pemerintah sehingga pelayanan public bias berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh Pemerintah dan Masyarakatnya.

***e-lelang* (*e-tendering*)**, adalah sebuah sistem yang akan mengadakan proses pelelangan umum secara elektronik untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. e-Lelang biasanya digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan evaluasi teknis untuk mendapatkan kualitas terbaik dan evaluasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar. Proses pengadaan barang atau jasa yang melalui e-Lelang adalah pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dengan variasi kualitas yang beragam, dan jasa

pemborongan nonkonstruksi. e-Lelang terdiri dari e-Lelang Umum (Regular e-Tendering) dan e-Penerimaan Berulang (Reverse e-Tendering).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti membuat definsi operasional. Definisi operasional dalam KKL ini adalah:

1. Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung agar pelayanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Strategi, merupakan penentuan cara yang harus dilakukan oleh UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung sebagai pembuat *e-lelang* supaya pelayanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat efektif, dan tercapainya tujuan yang ditetapkan. Strategi dalam KKL ini meliputi :
   a. Wawasan waktu, berapa lama waktu yang digunakan dalam mendapatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui *e-lelang*.
   b. Dampak, efektivitas *e-lelang* memberikan dampak atau ukuran, baik yang positif maupun yang negatif.
   c. Pemusatan upaya, fokus utama dari penggunaan *e-lelang* ini adalah memberikan pelayanan kepada semua pihak yang membutuhkan.
3. Kebijakan, faktor yang mendukung dalam kebijakan penggunaan *e-lelang* pada UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung

adalah pedoman yang digunakan dalam penggunaan *e-lelang* dan pengambilan keputusan. Kebijakan dalam KKL ini meliputi :

a. Pedoman, merupakan petunjuk yang dijadikan arahan sebagai petujuk. Dalam hal ini *e-lelang* diatur oleh suatu peraturan yang mengaturnya.
b. Pengambilan keputusan, ditentukan oleh sikap dalam memilih beberapa alternatif. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara mempertimbangan hasil yang dicapai dalam penggunaan *e-lelang* yaitu dengan perbaikan dan penyempurnaan penggunaan *e-lelang*, atau pengalokasian faktor-faktor yang mempengaruhi *e-lelang*, seperti SDM dan perbaikan infrastruktur.

4. Perencanaan adalah bagaimana caranya agar efektivitas *e-lelang* pada UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung bisa tercapai melalui perencanaan yang matang dalam hal strategi dan program sehingga bisa didapatkan hasil yang memuaskan dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota bandung.
5. Program, rencana yang menggambarkan *e-lelang* pada UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung sehingga tercapai efektivitas. Program dalam KKL ini meliputi :

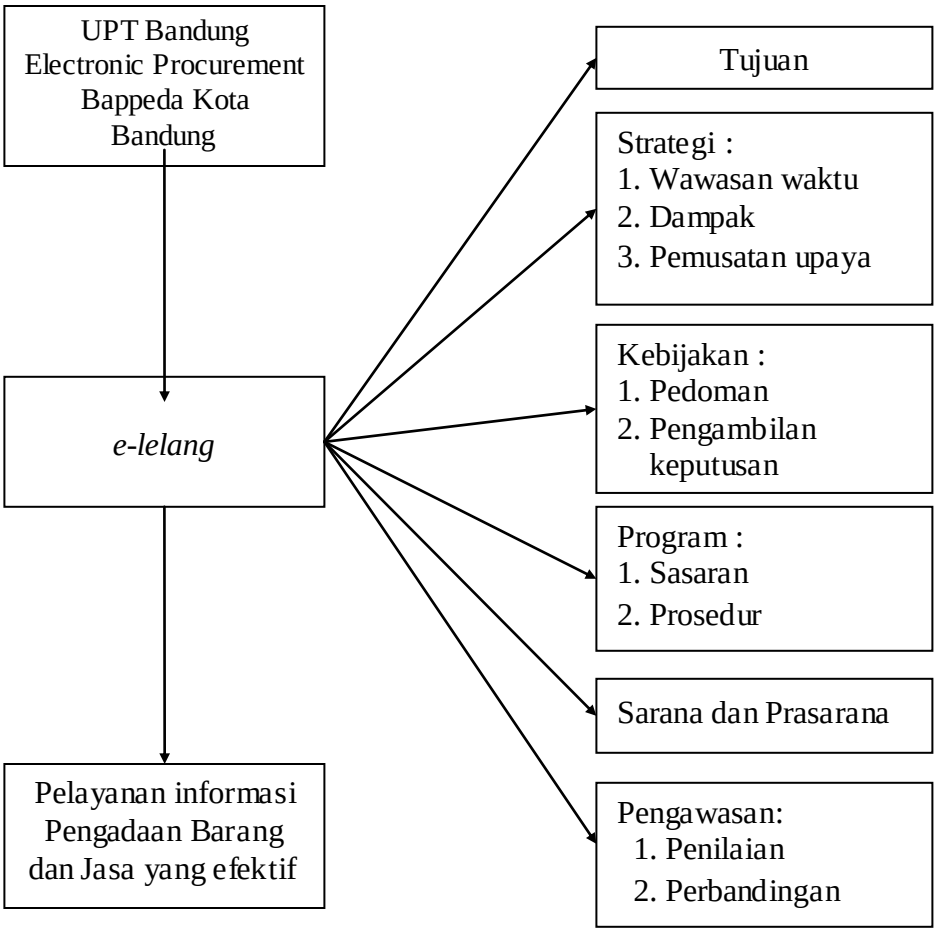
a. Sasaran, sararan dalam KKL ini adalah para pihak yang membutuhkan informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Para pihak dalam

memperoleh informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat mengakses langsung lewat *e-lelang*.

b. Prosedur, prosedur sangat dibutuhkan agar terjadi keteraturan. *e-lelang* dapat dilakukan dengan mudah karena sudah menggunakan sistem *online* sehingga tidak melalui birokrasi yang berbelit-belit.

6. Sarana dan prasaran merupakan factor pendukung yang sangat penting bagi UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung dalam melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah sehingga efektivitas *e-lelang* bisa tercapai
7. Pengawasan, pengawasan juga diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam *e-lelang* pada UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung. Pengawasan dalam penelitian ini meliputi :
   a. Penilaian, jika efektivitas dari *e-lelang* telah terelalisasikan maka penilaian bisa dilakukan. *e-lelang* efektif tidaknya, bisa dinilai oleh masyarakat dan pemerintah sendiri.
   b. Perbandingan, dengan adanya *e-lelang* dengan sistem teknologi informasi yang canggih, peneliti dapat membandingkannya dengan cara yang manual.

Bagan 1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Laporan KKL

1.6.1 Metode Laporan KKL

Metode KKL yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat Mohammad Nazir dalam bukunya *Metode Penelitian Sosial* yang mendefinisikan metode deskriptif, sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kasus peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki"(Nazir, 1998:63).

PenULIS menggunakan metode deskriptif, karena KKL ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang Efektivitas *e-lelang* di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah pelayanan publik. Berdasarkan metode tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Taylor dan Bogdan dalam bukunya Bagong Suyanto dan Sutinah yang berjudul *Metode Penelitian Sosial*, pendekatan kualitatif adalah: "Penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (dalam Bagong, 2005:166). Berdasarkan penjelasan dari definisi di atas, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari dari

tingkah laku manusia khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman terhadap orang yang diteliti mengenai tingkah laku manusia, penulis harus dapat mamahami proses interpretasi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang diteliti.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam KKL ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu:

1. Studi Pustaka *(Library Research)*

Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Menggunakan studi pustaka ini, penulis dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penulisan yang diharapkan, sehingga pekerjaan penulis tidak merupakan duplikasi.

2. Studi Lapangan *(Field Research)*

Peninjauan yang dilakukan langsung pada UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung yang menjadi objek penelitian dengan tujuan yakni, mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat, lebih *up to date,* disamping itu penulis juga melakukan suatu penulisan dengan cara sebagai berikut:

a) Observasi non partisipan

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga penulis dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan.

b) Wawancara *(Interview)*

Yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan instansi dan bagian-bagian yang menangani masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu pihak-pihak yang terlibat pada manajemen sumber daya aparatur dalam Efektivitas *e-lelang* di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan KKL ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional teknik analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif* adalah:

Pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan, reduksi data sesudah dilakukan semenjak pengumpulan data. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat

ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang dipilih disilang melalui komentar dari informasi yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi.

Kedua, penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan antara lain, terkait dengan peningkatan manajemen sumber daya aparatur melalui sistem informasi kepegawaian.

Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpelasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (*spesifik*) sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (*general*) (dalam Sugiyanto, 1992:15-20).

Peneliti menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk diinterpretasikan. Disamping itu data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

1.7 Lokasi dan Jadwal KKL

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat KKL adalah di UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung, yang beralamat di Jl. Wastukencana No. 2, Bandung. *Website : http://lpse.bandung.go.id*

Waktu penulisan ini adalah 7 (Tujuh) bulan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jadwal KKL

Waktu / Kegiatan	Tahun 2011				
	Apr	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agust**
Pengajuan Judul KKL	■				
Pengajuan Usulan KKL		■			
Pengajuan surat ke tempat KKL			■		
Pelaksanaan KKL				■	
Seminar Usulan KKL					■